



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin

- pertama dan belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100% (seratus persen).
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
 11. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama pada Pemerintah Daerah.
 12. Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 13. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
 14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 16. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah bentuk penghargaan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Pegawai ASN dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi dan kesejahteraan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
 17. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
 18. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh Pegawai ASN yang harus dicapai setiap tahun.
 19. Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
 20. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan atau unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
 21. Prestasi Kerja adalah suatu pendekatan dalam melakukan penilaian kerja para pegawai dan memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
 22. Kondisi Kerja adalah Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
 23. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada Pegawai ASN yang memiliki keterampilan khusus atau keahlian tertentu dan langka.

24. Pertimbangan Objektif Lainnya adalah kriteria yang diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
25. Aktivitas Harian adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan pegawai setiap hari dalam rangka melaksanakan tugas pokok maupun penugasan pimpinan.
26. Aplikasi Aktivitas yang selanjutnya disebut e-Aktivitas adalah aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan laporan aktivitas harian pegawai.
27. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
28. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai.
29. Tingkat Kehadiran adalah persentase kehadiran pegawai dalam satu bulan berdasarkan data absensi yang sah yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang pada masing-masing Perangkat Daerah dan divalidasi oleh Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.
30. Jumlah Kehadiran adalah jumlah kehadiran pegawai yang dihitung berdasarkan hari kerja.
31. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Perangkat Daerah atau unit Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
32. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas dilapangan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah mengatur tentang pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan:
 - a. kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. disiplin pegawai;
 - c. kinerja pegawai;
 - d. keadilan dan kesejahteraan pegawai;
 - e. integritas pegawai; dan
 - f. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksud bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksud bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. proporsionalitas dimaksud bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksud bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksud bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksud bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksud bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB II PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP ASN kepada Pegawai ASN.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberikan secara penuh kepada:
 - a. CPNS; dan
 - b. PNS yang bertugas pada BLUD dan Non BLUD sebagai berikut:
 - 1. UPTD Rumah Sakit;
 - 2. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 - 3. UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (3) CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memperoleh TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Pagu TPP ASN sampai dengan yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 mendapatkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Pagu TPP ASN.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 mendapatkan sebesar 87% (delapan puluh tujuh persen) dari Pagu TPP ASN.

Pasal 5

- (1) Pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP ASN dalam hal PNS penerima TPP ASN tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pembayaran TPP terhadap penerima sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan

pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan mengembalikan aset milik Pemerintah Daerah.

- (3) Pembayaran TPP terhadap penerima sanksi administratif kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan kerugian negara/daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan penyelesaian ganti kerugian terhadap perseorangan.
- (5) Dalam hal penyelesaian kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan penggantian secara bertahap maka pembayaran TPP akan dibayarkan setelah memenuhi kewajiban penyelesaian kerugian per tahapan.

Pasal 6

TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tidak diberikan kepada PNS yang:

- a. tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan surat pernyataan dari atasan langsungnya;
- b. diberhentikan sementara karena diangkat menjadi pejabat negara;
- c. diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
- d. diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
- e. tugas belajar yang dibebaskan dari jabatannya terhitung sejak ditetapkan dengan keputusan tugas belajar yang bersangkutan;
- f. sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara atau sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
- g. diberhentikan tidak atas permintaan sendiri dan sedang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; dan
- h. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penetapan Jabatan Pelaksana dan JF sesuai kompetensi dan tugas yang diberikan kepada PNS/CPNS dengan berpedoman pada syarat minimal kualifikasi yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menetapkan Jabatan Pelaksana dan JF, Kepala Perangkat Daerah memperhatikan syarat kompetensi/kemampuan yang dimiliki PNS/CPNS, tugas yang diberikan dan persyaratan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan terhadap Jabatan.

- (3) Kepala Perangkat Daerah dapat menurunkan Kelas Jabatan dalam menetapkan Jabatan Pelaksana dan JF yang dimiliki oleh PNS/CPNS apabila berdasarkan penilaian oleh atasan langsung dan Kepala Perangkat Daerah, PNS/CPNS tersebut dianggap belum kompeten melaksanakan tugas sesuai jabatan dan pendidikan formal yang dimiliki.
- (4) Kepala Perangkat Daerah dapat menurunkan Kelas Jabatan dalam menetapkan Jabatan Pelaksana dan JF apabila kebutuhan dalam Peta Jabatan tidak tersedia.

Pasal 8

- (1) Pemberian TPP ASN diberikan kepada ASN secara berkala berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini dan dianggarkan dalam APBD dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian TPP ASN dibayarkan setiap tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.
- (3) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan lebih lambat dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) PNS yang meninggal dunia tetap diberikan TPP ASN sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir sebesar 1 (satu) bulan penuh sesuai Pagu TPP ASN yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal terjadi mutasi maupun promosi PNS maka TPP ASN dibayarkan oleh Perangkat Daerah yang lama sesuai dengan Pagu Perangkat Daerah yang lama.
- (6) PNS yang mutasi ke instansi lain di atas tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan tetap diberikan TPP ASN sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir sebesar 1 (satu) bulan penuh sesuai Pagu TPP ASN yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal terjadi mutasi PNS dari luar Pemerintah Kota Banjarmasin, pegawai diberikan TPP ASN sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (8) TPP ASN bulan berjalan dibayarkan sesuai perhitungan tingkat kehadiran dan aktivitas bulan sebelumnya.
- (9) TPP ASN bulan Januari dibayarkan atas tingkat kehadiran dan aktivitas bulan Desember tahun sebelumnya.
- (10) TPP ASN ke-13 dan ke-14 dapat diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui Beban Kerja normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal paling sedikit 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.
- (3) Besaran TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) dari besaran basic TPP ASN.

Pasal 12

- (1) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3), dapat diberikan tambahan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari basic TPP ASN;
 - b. Inspektur sebesar 42% (empat puluh dua persen) dari basic TPP ASN;
 - c. Asisten di Sekretariat Daerah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari basic TPP ASN;
 - d. diberikan TPP ASN sebesar 23% (dua puluh tiga persen) dari basic TPP ASN meliputi:
 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan; dan
 4. Kepala Dinas Penamaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - e. Kepala Badan/Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 20% (dua puluh persen) dari basic TPP ASN;
 - f. Staf Ahli Wali Kota sebesar 20% (dua puluh persen) dari basic TPP ASN;
 - g. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah sebesar 5% (lima persen) dari basic TPP ASN;
 - h. Inspektur Pembantu Khusus sebesar 32% (tiga puluh dua persen) dari basic TPP ASN;
 - i. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, dan III sebesar 30% (tiga puluh persen) dari basic TPP ASN;
 - j. Lurah sebesar 15% (lima belas persen) dari basic TPP ASN;
 - k. Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Pelaksana, dan JF pada Dinas Penamaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 3% (tiga persen) dari basic TPP ASN.

- (2) Alokasi TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan dan karakteristik daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TIM PELAKSANAAN TPP ASN

Pasal 18

- (1) Wali Kota membentuk tim pelaksanaan TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tim pelaksanaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut:
- a. Pengarah I Wali Kota;
 - b. Pengarah II Wakil Wali Kota;
 - c. Penanggung Jawab Sekretaris Daerah;
 - d. Ketua Tim Pelaksanaan Asisten Administrasi Umum;
 - e. Anggota perangkat daerah yang membidangi:
 1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN;
 2. Organisasi yang bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan/atau Pertimbangan Objektif Lainnya;
 3. Kepegawaian yang bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 4. Hukum menyusun Peraturan Wali Kota tentang TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Perencanaan yang bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP ASN; dan/atau
 6. Pengawasan yang bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V PENILAIAN PEMBERIAN TPP ASN

Bagian Kesatu Pembayaran

Pasal 19

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.

Bagian Kedua
Produktivitas Kerja

Pasal 20

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan Aktivitas Harian Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai.
- (2) Setiap PNS wajib mengisi Aktivitas Harian secara *online* melalui e-Aktivitas.
- (3) Pengisian Aktivitas Harian pada e-Aktivitas paling lambat pukul 23.59 WITA pada hari berikutnya.
- (4) Pejabat Penilai memberikan penilaian terhadap laporan e-Aktivitas paling lambat pukul 23.59 WITA terhitung 3 (tiga) hari kalender sejak diajukan.
- (5) Apabila Pejabat/Atasan Penilai tidak memvalidasi data dan tidak memberikan penilaian atas laporan aktivitas yang disampaikan oleh bawahan sampai dengan batas waktu berakhir, maka laporan aktivitas yang disampaikan otomatis diterima.
- (6) PNS yang status penilaiannya ditolak oleh Pejabat Penilai dapat mengajukan keberatan atas status penolakan Pejabat Penilai dengan dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh Atasan Pejabat Penilai, dan Pejabat Penilai dapat memperbaiki hasil penilaiannya dalam waktu 1x24 jam setelah memberikan penilaian pertama.
- (7) Apabila keberatan tidak dapat diterima oleh Pejabat Penilai, maka PNS yang ditolak keberatannya oleh Pejabat Penilai dalam waktu 1x24 jam dapat mengajukan keberatan ke Atasan Pejabat Penilai.
- (8) Dalam waktu 1x24 jam sejak diajukannya keberatan sebagaimana dimaksud ayat (7) maka aktivitas PNS yang statusnya ditolak oleh Pejabat Penilai, dinilai oleh Atasan Pejabat Penilai.
- (9) Aktivitas harian yang dilakukan di luar jam kerja dan/atau di luar hari kerja tetap diperhitungkan sebagai Aktivitas Harian yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsung.
- (10) Jumlah TPP ASN yang diterima merupakan hasil dari tingkat kehadiran dan nilai aktivitas, dengan formulasi matematis sebagai berikut:

Rumus 1: $((40\% \text{ PTPP}) \times \text{PTK})$

Rumus 2: $((40\% \text{ PTPP}) \times \text{PNA})$

Rumus 3: $((20\% \text{ PTPP}) \times \text{PNKP})$

$\text{TPP} = \text{Rumus 1} + \text{Rumus 2} + \text{Rumus 3}$

Keterangan:

TPP : Tambahan Penghasilan Pegawai

PTPP : Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai

PTK : Persentase Tingkat Kehadiran

PNA : Persentase Nilai Aktivitas

PNKP : Persentase Nilai Kinerja Pegawai

- (11) Bagi Pejabat Penilai/Atasan Pejabat Penilai yang melakukan tugas dinas keluar Daerah tetap menilai aktivitas bawahannya.
- (12) Bagi Pejabat Penilai/Atasan Pejabat Penilai yang sedang menjalankan cuti atau melaksanakan tugas lain melebihi 7 (tujuh) hari maka ditunjuk pejabat Pelaksana Harian (Plh.) untuk menilai aktivitas bawahannya.
- (13) Bagi Pejabat Penilai/Atasan Pejabat Penilai yang sedang menjalankan cuti atau melaksanakan tugas lain selama atau kurang dari 7 (tujuh) hari tetap menilai aktivitas bawahannya.
- (14) Bagi Pejabat Penilai/Atasan Pejabat Penilai yang sedang menjalankan Cuti Luar Tanggungan Negara tidak dapat menilai aktivitas bawahannya.
- (15) Dalam hal terdapat kekosongan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pejabat Fungsional yang diberi Tugas Tambahan maka ditunjuk pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) untuk menilai aktivitas bawahannya.
- (16) Penilaian Kinerja Pegawai berdasarkan predikat kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf b terdiri atas:
 - a. Sangat Baik;
 - b. Baik;
 - c. Butuh Perbaikan;
 - d. Kurang/*Misconduct*; dan
 - e. Sangat Kurang.
- (17) Pemberian TPP ASN berdasarkan Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan 100% (seratus persen) dari bobot penilaian kinerja pegawai.
- (18) Pemberian TPP ASN berdasarkan Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf d dan huruf e diberikan 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian kinerja pegawai.

Bagian Ketiga
Disiplin Kerja

Pasal 21

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi:
 - a. terlambat masuk kerja;
 - b. pulang sebelum waktunya; dan
 - c. tidak masuk kerja.
- (2) Perhitungan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara elektronik atau *online* dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Setiap PNS wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau *online* pada setiap kehadiran di tempat kerja masing-masing;
- (4) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pada waktu masuk kerja dan pulang kerja.

- (5) Perhitungan Persentase Tingkat Kehadiran sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Kehadiran}}{\text{Jumlah Hari Kerja}} \times 100\%$$

- (6) Ketidakhadiran tanpa kabar, sakit dan cuti mengurangi Jumlah Persentase Kehadiran kecuali tugas luar daerah, cuti tahunan, cuti bersama dan mengikuti pengembangan kompetensi diakui per harinya sebesar 420 (empat ratus dua puluh) menit.
- (7) Kebenaran data kehadiran adalah tanggung jawab PNS yang bersangkutan dan Kepala Perangkat Daerah.
- (8) Validasi tingkat kehadiran di daftar nominatif TPP ASN ditandatangani oleh Pejabat yang membidangi terkait TPP ASN pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 22

- (1) PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. <31menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit	1,5%

- (2) PNS yang tidak melakukan absensi pada jam masuk maka dihitung terlambat selama 4 (empat) jam.
- (3) PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d.<61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d.<91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit	1,55%

- (4) PNS yang tidak melakukan absensi pada jam pulang maka dihitung pulang kerja sebelum waktunya selama 4 (empat) jam.

- (5) Pengurangan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), menunjukkan Tingkat Ketidakhadiran PNS yang diakumulasi selama 1 (satu) bulan.

Pasal 23

- (1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor tempat bekerja yang menyebabkan tidak dapat melakukan absensi secara elektronik, *online* dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (2) PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan pembagian jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik atau *online*, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsungnya.
- (3) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

Pasal 24

PNS yang menerima hukuman disiplin dikenakan sanksi pengurangan tunjangan kinerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
- b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dikenakan pengurangan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
- c. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
- d. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
- e. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dikenakan pengurangan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
- f. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
- g. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan dan hukuman disiplin tingkat berat

berupa pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, diberikan TPP sesuai dengan jabatan barunya yang dibuktikan dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin; dan

- h. Apabila Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada PNS berdampak pada Penurunan Kelas Jabatan, maka TPP ASN yang diberikan menggunakan Kelas Jabatan yang baru setelah Hukuman Disiplin ditetapkan.

Bagian Keempat
Komponen Pengurangan TPP ASN

Pasal 25

- (1) Ketidakhadiran karena cuti selain cuti tahunan ditentukan dengan pengurangan komponen Tingkat Kehadiran sebagai berikut:
 - a. PNS yang tidak masuk kerja karena cuti selain cuti tahunan akan mengurangi persentase Tingkat Kehadiran;
 - b. jika selama 1 (satu) bulan penuh maka TPP ASN dikurangi sebesar 100% (seratus persen);
 - c. PNS yang tidak masuk kerja karena cuti sakit harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter atau Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
 - d. PNS yang sakit 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari wajib memberikan surat keterangan sakit kepada atasan langsung;
 - e. Pengajuan cuti sakit lebih dari 2 (dua) hari wajib mengajukan cuti sakit secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter/dokter pemerintah dan dilengkapi dengan form permohonan cuti sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. khusus untuk PNS laki-laki yang mengajukan cuti alasan penting dikarenakan isterinya melahirkan/operasi cesar maka jumlah hari cuti yang diberikan disesuaikan dengan jumlah hari isteri dirawat di Rumah Sakit dan dilengkapi dengan melampirkan Surat Keterangan Rumah Sakit/Surat Keterangan Rawat Inap Isteri.
- (2) Selama menjalankan cuti, Tingkat Kehadiran disesuaikan dengan persentase absensi kehadiran yang didapatkan dan PNS tidak dapat mengisi Aktivitas Harian.
- (3) PNS yang mengajukan cuti sakit karena terkonfirmasi positif Covid-19 tidak mendapatkan pengurangan persentase kehadiran dan mendapatkan 360 (tiga ratus enam puluh) menit untuk aktivitas harian.
- (4) Cuti sakit sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dilengkapi dengan surat keterangan sakit Covid-19 dari instansi yang berwenang/surat keterangan dokter yang menyatakan positif Covid-19.

Pasal 26

- (1) Pembayaran TPP ASN dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada rekening gaji PNS atau rekening lain dalam Bank yang sama dengan rekening gaji.
- (3) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TPP KEPALA SEKOLAH, GURU, PENILIK SEKOLAH, PAMONG BELAJAR,
PENGAWAS SEKOLAH, DAN PPPK

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian TPP ASN kepada PNS yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah, Guru PNS, Penilik Sekolah, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah dan PPPK diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 28

- (1) Keadaan kahar/*force majeure* adalah berupa keadaan bencana alam, wabah penyakit menular, perang atau keadaan lain di luar kemampuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar/*force majeure*, PNS tetap berkewajiban mengisi aktivitas harian dan absensi.
- (3) Wali Kota dapat menetapkan ketentuan perhitungan persentase disiplin dan produktivitas PNS dalam keadaan kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII

EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi dan pengawasan pemberian TPP ASN di Daerah.
- (2) Pelaksanaan evaluasi pemberian TPP ASN dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan pemberian TPP ASN yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) PNS tidak diperkenankan menerima honorarium kegiatan.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) yaitu Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Perangkat Daerah, Honorarium Narasumber, Moderator, *Master of Ceremony* (MC) dan Pembaca Doa.
- (3) PNS yang belum diangkat ke dalam JF maka Pembayaran TPP ASN dapat disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan jumlah kebutuhan di Peta Jabatan.
- (4) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN Kelas Jabatan terendah sesuai Jenis Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS yang mengalami kenaikan Kelas Jabatan, maka Perangkat Daerah memperhatikan ketersediaan peta jabatan dan menyampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan untuk divalidasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran Perangkat Daerah.
- (6) TPP ASN hanya diberikan kepada CPNS yang pengangkatannya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (7) Jumlah Sub Koordinator/Ketua Tim tidak boleh melebihi jumlah Sub Koordinator pada Perangkat Daerah.
- (8) Dalam hal Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan tunjangan terbit maka ketentuan pengenaan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, huruf e, dan huruf f dikesampingkan dan mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (9) TPP ASN dibayarkan sejak bulan Januari 2023.

Pasal 32

Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik atau *online* dikarenakan kerusakan peralatan, sidik jari atau identitas lain PNS tidak

terbaca dalam peralatan atau belum terdapat peralatan maka pengisian Tingkat Kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 33

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau Penjabat menerima TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau Penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau Penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang sama pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang lebih satu bulan kalender merangkap sebagai Penjabat, Pelaksana Tugas (Plt.), dan Pelaksana Harian (Plh.) hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (4) TPP ASN bagi PNS yang merangkap sebagai Penjabat, Pelaksana Tugas (Plt.), dan Pelaksana Harian (Plh.) memperoleh TPP ASN sejak yang bersangkutan melakukan aktivitas/berkinerja selama satu bulan penuh dan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (5) Pemberian TPP ASN bagi Penjabat, Pelaksana Tugas (Plt.), dan Pelaksana Harian (Plh.) sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (6) PNS yang diberikan tugas sebagai Penjabat, Pelaksana Tugas (Plt.), dan Pelaksana Harian (Plh.) diperbolehkan untuk mengisi aktivitas tambahan pada jabatannya.

Pasal 34

JF Ahli Madya pada Dinas Kesehatan yang ditugaskan di UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat maka perhitungan pembayaran TPP ASN mengikuti perhitungan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Hukuman disiplin yang telah dijalani oleh pegawai sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini diselesaikan sesuai dengan Peraturan Wali Kota

Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- (2) Pegawai yang menjalani hukuman disiplin dan mendapatkan pengurangan TPP sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku maka tetap menjalani ketentuan pengurangan TPP sesuai dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 34), sepanjang tidak mengatur tentang hukuman disiplin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 JANUARI 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN